

Analisis Bisnis Pengusahaan Hutan Rakyat Dengan Pola Monokultur Jenis Jabon

Financial Analysis Of Jabon (*Anthocephalus Cadamba Miq.*)
Monoculture Plantation In Private Forest

Wieke Herningtyas

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Intan Yogyakarta
Jalan Magelang Km. 5, 6 Yogyakarta 55284
Email: herningtyaswieke@gmail.com

INTISARI

Jabon merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki prospek tinggi, karena pertumbuhannya yang sangat cepat, kemampuan beradaptasinya pada berbagai kondisi tempat tumbuh, perlakuan silvikulturnya yang relatif mudah. Jenis ini juga diharapkan menjadi semakin penting bagi industri perkebunan di masa mendatang, terutama ketika bahan baku kayu pertukangan dari hutan alam diperkirakan akan semakin berkurang. Untuk itu perlu dilakukan dianalisis bisnis pengusahaan budidaya jabon dalam hutan rakyat dan mengidentifikasi peluang pendanaan untuk mengembangkan usaha hutan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan rencana pengusahaan hutan rakyat dengan jenis jabon pola monokultur dengan menggunakan skema modal pinjaman bank dan skema modal kombinasi BLU dan bank, serta menganalisis keuntungan dan kelemahan pendanaan melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan untuk mengembangkan hutan rakyat. Hasil penilaian kelayakan pengusahaan hutan rakyat menunjukkan bahwa pengusahaan hutan rakyat dengan pola monokultur di hutan rakyat menguntungkan secara finansial.

Kata kunci: jabon, pola monokultur, private forest, analisis finansial, Badan Layanan Umum (BLU)

ABSTRACT

Jabon (Anthocephalus cadamba Miq.) is one of promising tree species due to its rapid growth, its adaptability to various site conditions, and its relatively easy silviculture treatment. Jabon is expected to be important tree species for the timber industry in the future, especially when wood product from natural forests and perhutani are decreasing. It is necessary to analyze the business of Jabonplantation in community forest and identify funding opportunity to develop community forest business. The purposes of this research were to know the feasibility of forest management plan of jabonplantation using bank loan capital and combination (Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan and bank loan capital) and to analyze the advantages and disadvantages of funding through Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan to develop community forest. The feasibility of community forest business of Jabonplantation is financially advantageous.

Keywords: jabon, monoculture plantation, community forest, financial analysis, Badan Layanan Umum (BLU)

PENDAHULUAN

Penurunan potensi hutan membuat kemampuan kawasan hutan dalam menyuplai kebutuhan kayu global mengalami penurunan, disisi lain kebutuhan kayu untuk pasar global

semakin meningkat. Penurunan itu terlihat dari semakin rendahnya umur tebangan kayu di perhutani. Seperti yang kita ketahui jati merupakan produk utama perhutani. Saat ini umur tebangan jati adalah umur 40 tahun sebagai daur ekonomisnya sedangkan umur biologis dimana tanaman jati telah masak

tebang dan siap untuk dipanen adalah 80 tahun. Untuk itu diperlukan tambahan pasokan kayu selain dari hutan negara yaitu dari hutan rakyat, sehingga prospek investasi hutan rakyat dengan budidaya jenis tanaman berkayu bagi pemenuhan kebutuhan kayu global cukup cerah.

Salah satu jenis tanaman yang baru dikenal masyarakat namun banyak penelitian meyakini investasi prospek menguntungkan adalah jenis jabon. Jabon merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki prospek tinggi, karena pertumbuhannya yang sangat cepat, kemampuan beradaptasinya pada berbagai kondisi tempat tumbuh, perlakuan silvikulturnya yang relatif mudah, serta relatif bebas dari serangan hama dan penyakit yang serius. Jenis ini juga diharapkan menjadi semakin penting bagi industri perkayuan di masa mendatang, terutama ketika bahan baku kayu pertukangan dari hutan alam diperkirakan akan semakin berkurang. Pada saat ini jabon juga banyak dibudidayakan oleh petani, terutama di Kalimantan dan Jawa. Di beberapa daerah di Jawa, jabon pada umumnya ditanam untuk menggantikan tanaman jati yang miskin riap setelah pemanenan (Nair dan Sumardi 2000).

Hutan rakyat sudah lama dibudidayakan namun masih sedikit yang tertarik serius dalam investasi. Salah satu karakteristik dari hutan rakyat adalah memiliki jangka waktu pertumbuhan relatif lama. Sifat pertumbuhan hutan rakyat yang relatif lama tersebut menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah kurang berminat untuk mengembangkan hutan rakyat sehingga investasi bidang kehutanan masih dijangkau pada masyarakat menengah keatas. Ketidakpastian dalam pertumbuhan sering menimbulkan masalah dalam mendapatkan kredit perbankan serta persyaratannya sehingga akses petani untuk mendapatkan modal masih terbatas. Untuk itu perlu dilakukan dianalisis bisnis perusahaan budidaya jabon dalam hutan rakyat dan mengidentifikasi peluang pendanaan untuk mengembangkan usaha hutan rakyat. Tujuan dari penelitian ini: 1. Mengetahui kelayakan rencana perusahaan hutan rakyat dengan jenis jabon pola monokultur dengan menggunakan skema modal pinjaman bank dan skema modal kombinasi BLU dan bank, 2. menganalisis keuntungan dan kelemahan pendanaan melalui Badan Layanan

Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan untuk mengembangkan hutan rakyat.

BAHAN DAN METODE

Jabon memiliki nama botani *Anthocephalus cadamba* Miq. Dari marga Rubiaceae dan Submarga Cinehono. Jabon memiliki batang lurus dan silindris serta memiliki tajuk tinggi seperti payung dengan sistem percabangan yang khas mendatar. Tinggi pohon dapat mencapai 45 m dengan diameter batang 100–160 cm dan kadang-kadang berbanir hingga ketinggian 2 m. Jabon tumbuh secara alami di Australia, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura dan Vietnam. Jabon merupakan jenis tanaman yang disukai tidak hanya di habitat alaminya, tetapi juga di luar habitat alaminya (Krisnawati et al 2011).

Jabon memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis-jenis pohon kehutanan cepat tumbuh lainnya yang saat ini telah dikenal masyarakat luas, antara lain: 1) jenis pohon asli Indonesia dengan penyebaran (asli maupun tanaman) yang luas, 2) mudah diperbanyak, karena benih telah tersedia di pasaran, dan jabon juga dapat diperbanyak secara vegetatif melalui stek, sambungan, cangkok, maupun kultur jaringan, 3) budidayanya (produksi bibit, penanaman, dan pemeliharaan) mudah, informasi teknik budidaya telah tersedia, 4) kayunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan dari yang sederhana sampai untuk membuat meubel maupun bahan-bahan industri, dan 5) jabon dikenal sebagai tanaman obat. (Mansur 2012).

Investasi dapat diartikan sebagai korbanansumber daya ekonomi untuk melaksanakan kegiatan (usaha) yang daripadanya diharapkan dapat mendatangkan manfaat (benefits) dan keuntungan (profits). Suatu investasi dikatakan mendatangkan manfaat dan menguntungkan apabila dari kegiatan yang dibiayai tersebut dapat mengembalikan seluruh korbanansumber daya ekonomi yang ditanam dan ditambah dengan keuntungan yang merupakan sisa hasil usaha (Nugroho 2004). Melihat kegunaannya yang strategis sebagai bahan pengambilan keputusan. Suatu studi kelayakan harus terkait sertamemperhatikan mutudanjangkauan pengkajian.

Untuk mengukur atau menilai suatu proyek berdasarkan pada kriteria penilaian investasi dengan menghitung Nilai sekarang Bersih atau Net Present Value (NPV) dan tingkat pengembalian Internal atau Internal Rate of Return (IRR) (Gittinger, 1986). Batasan yang secara umum digunakan untuk menilai kelayakan suatu usaha adalah Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), dan Net Present Value (NPV). Suatu usaha dikatakan layak apabila memiliki nilai B/C ratio > 1, nilai NPV positif, dan IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan (Klemperer 1996).

Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus, yang umumnya berasal dari faktor eksternal (pemerintah, LSM, swasta dan lain-lain), yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk bertindak atau mengadopsi teknik dan metode baru yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi (Wijayanto 2007). Pengembangan skema kredit untuk mendanai pembangunan hutan berbasis masyarakat di Indonesia sesungguhnya telah lama dilakukan. Pada 1988–1998 disediakan Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), kemudian pada 1997–2000 dikembangkan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), dan sejak 2008 dikembangkan skema Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat (PDBHTR) untuk percepatan pembangunan HTR yang merupakan salah satu varian hutan tanaman berbasis masyarakat yang dapat diakses melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Bramasto 2011).

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pendanaan hutan rakyat adalah *desk study* dan *review* literatur. Data kuantitatif biaya dan keuntungan hutan rakyat dianalisis dengan Analisa Biaya dan Manfaat (*Cost Benefit Analysis*) secara finansial. Kriteria-kriteria ukuran kelayakan proyek dalam analisis finansial yang digunakan antara lain :

1. Net Present value (NPV)

Suatu kegiatan dikatakan layak jika NPV Positif.

$$NPV = \sum_{y=0}^n \frac{Ry}{(1+r)^y} - \sum_{y=0}^n \frac{Cy}{(1+r)^y}$$

Keterangan :

Ry : Penerimaan pada tahun ke-y

Cy : Biaya pada tahun ke-y

i : suku bunga yang merupakan faktor diskonto

y : satuan waktu dalam tahun

n : tahun ke n

2. Benefit Cost Ratio (B/CR)

Kegiatan dikatakan layak jika B/CR lebih besar dari satu.

$$B/CR = \frac{\sum_{y=0}^n \frac{Ry}{(1+r)^y}}{\sum_{y=0}^n \frac{Cy}{(1+r)^y}}$$

Keterangan :

Ry : Penerimaan pada tahun ke-y

Cy : Biaya pada tahun ke-y

i : suku bunga yang merupakan faktor diskonto

y : satuan waktu dalam tahun

n : tahun ke n

3. Internal Rate of Return (IRR)

Suatu proyek dikatakan layak bila IRR lebih besar dari suku bunga diskonto.

$$IRR = \sum_{y=0}^n \frac{Ry}{(1+IRR)^y} - \sum_{y=0}^n \frac{Cy}{(1+IRR)^y} = 0$$

Keterangan :

Ry : Penerimaan pada tahun ke-y

Cy : Biaya pada tahun ke-y

IRR : suku bunga pengembalian

y : satuan waktu dalam tahun

n : tahun ke n

Asumsi yang digunakan pada analisis ini adalah:

1. Luas lahan 1 Ha

2. Jangka waktu analisis 7 tahun

3. Suku bunga yang digunakan adalah 13% berdasarkan rata-rata suku bunga kredit bank

4. Jarak tanam pola monokultur 3 x 3 m

5. Tingkat mortalitas jabon 10%

6. Biaya investasi dihitung pada tahun pertama, meliputi penyewaan lahan, pembelian bibit dan

pembelian peralatan pertanian (parang, cangkul, ajir dll)

7. Satu HOK adalah satu hari orang kerja dengan upah Rp 50.000/hari

8. Penerimaan penjualan kayu berasal dari hasil panen dan hasil penjarangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya pembangunan hutan rakyat dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah jenis biaya yang

selama kisaran waktu operasi tertentu atau tingkat kapasitas produksi tertentu selalu tetap jumlahnya atau tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Biaya tetap pada analisis ini adalah biaya sewa tanah. Sedangkan biaya berubah adalah biaya yang berubah apabila luas usahanya berubah. Biaya ini ada apabila ada sesuatu barang yang diproduksi. Perkiraan biaya ini dengan mengacu pada penelitian Halawane et al (2011) dengan disesuaikan perkiraan biaya terkini.

Tabel 1. Biaya tahun I

No	Uraian	Volume		Harga satuan	jumlah
		Angka	Satuan		
1.	Sewa tanah	1	Ha	5.000.000	5.000.000
2.	bibit	1.200	polibag	5.000	5.000.000
3.	Pembuatan lubang tanam	30	HOK	50.000	1.500.000
4.	Pupuk kandang	3.500	Kg/pohon	500	1.750.000
5.	insektisida	5	liter	60.000	300.000
6.	Peralatan pertanian	1	paket	5.000.000	5.000.000
7.	Pemeliharaan 2x setahun	10	HOK	50.000	500.000
Total biaya pada tahun ke 1					18.7800.000

Tabel 2. Biaya tahun II

No	Uraian	Volume		Harga satuan	Jumlah
		Angka	Satuan		
1.	Sewa tanah	1	Ha	5.000.000	5.000.000
2.	urea	107	kg	2.000	214.000
3.	Pemeliharaan 2x setahun	10	HOK	50.000	500.000
Total biaya pada tahun ke 1I					5.714.000

Tabel 3. Biaya tahun III

No	Uraian	Volume		Harga satuan	jumlah
		Angka	Satuan		
1.	Sewa tanah	1	Ha	5.000.000	5.000.000
2.	urea	107	kg	2.000	214.000
3.	Pemeliharaan 2x setahun	10	HOK	50.000	500.000
4.	Penjarangan	10	HOK	50.000	500.000
Total biaya pada tahun ke 1II					6.214.000

Tabel 4. Biaya tahun ke IV sampai VI

No	Uraian	Volume		Harga satuan	jumlah
		Angka	Satuan		
1.	Sewa tanah	1	Ha	5.000.000	5.000.000
2.	urea	214	kg	2.000	214.000
3.	Pemeliharaan 2x setahun	10	HOK	50.000	500.000
Total biaya pada tahun ke IV-VI					5.714.000

Tabel 5. Biaya tahun 7

No	Uraian	Volume		Harga satuan	jumlah
		Angka	Satuan		
1.	Pemanenan dan pengangkutan	219	M3	200.000	43.800.000
Total biaya pada tahun ke IV-VI					43.800.000

Penerimaan Usaha Tani Hutan Rakyat dihitung dari output tanaman yang dinilai pada saat tegakan sudah masak tebang dan dalam kondisi batang berdiri. Satuan fisik yang digunakan adalah meter kubik per tahun (m³/tahun). Harga yang dipakai adalah harga

tebasan, yaitu harga penjualan petani kepada pedagang kayu pada saat kayu berdiri di lahan secara borongan. Setelah diketahui biaya yang dikeluarkan dan penerimaan usaha tani hutan rakyat maka dianalisis aliran kas yang didiskonto. Pembangunan hutan rakyat layak apabila BCR>1, NPV>0 dan IRR lebih besar dari suku bunga yang telah ditetapkan/berlaku.

Tabel 6. Penerimaan

No	Uraian	Volume		Harga satuan	jumlah
		Angka	Satuan		
1.	Hasil penjarangan	300	pohon	20.000	600.000
2.	Hasil panen	219	m ³	1.000.000	219.000.000
Total pendapatan pada tahun ke VI					219.600.000

Perkiraan jumlah tanaman yang hidup adalah 90% dari penanaman sehingga 1000 pohon dan penjarangan sebesar 30% dari tanaman yang hidup atau 300 pohon dan jumlah pohon pada saat penebangan adalah 700 pohon. Perkiraan diameter dan riap mengacu pada penelitian Krisnawati et al (2011) grafik pertumbuhan dan riap dari tanaman jabon. Perkiraan diameter pada saat penebangan umur 7 tahun adalah 20 cm dengan tinggi 15 m atau tinggi bebas cabang 10 m, sehingga perkiraan volume penebangan adalah 219.8 m³.

Harga yang digunakan dalam analisis ini adalah Rp 1.000.000 sesuai dengan harga di pasaran menurut (Halawane et al 2011). Suku bunga yang digunakan pada analisis ini adalah 13 % dan jangka waktu analisis adalah 7 tahun

sesuai dengan daur pemanenan. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan analisis kelayakan proyek.

Tabel 7. Analisis finansial pembangunan hutan rakyat dengan skema pinjaman bank

Kriteria kelayakan	Hasil analisis finansial
NPV	Rp 74.619.123
BCR	1.74
IRR	49%

Dari tabel menunjukkan bahwa pengelolaan hutan rakyat jabon layak secara

finansial, hal ini ditandai dengan nilai NPV sebesar 74.619.123 artinya pengelolaan hutan rakyat jabon ini layak secara finansial. Apabila menggunakan BCR akan didapatkan nilai sebesar 1.74 artinya jika proyek ini memiliki nilai BCR lebih dari satu benefit atau keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan sehingga pengelolaan hutan rakyat jabon ini layak secara finansial. Apabila digunakan IRR maka nilainya adalah sebesar 0.49 artinya suku bunga diskonto yang menyebabkan jumlah hasil diskonto pendapatan sama dengan jumlah diskonto biaya, atau suku bunga yang menyebabkan NPV sebesar nol. Suatu proyek dikatakan layak jika IRR lebih besar dari suku bunga diskonto sehingga perusahaan hutan rakyat ini sudah menguntungkan.

Dari ketiga parameter kelayakan tersebut perusahaan hutan rakyat ini menguntungkan walaupun masih dalam taraf minimal. Apa yang diperoleh dari hutan rakyat ini masih setara apabila pengembang proyek hanya mendepositokan biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan hutan rakyat ini dengan suku bunga deposito bank saat ini sebesar 5.5%. kecilnya keuntungan hari perusahaan hutan rakyat ini karena biaya sewa lahan yang besar yaitu sebesar Rp 5.000.000 /ha sehingga akan lebih menguntungkan jika pengembang proyek menggunakan lahan dengan harga sewa yang masih rendah. Bahkan keuntungan akan besar jika pengembang proyek ini adalah juga pemilik lahan yang tidak mengeluarkan biaya sewa hanya biaya pajak lahannya saja.

Karakteristik hutan rakyat yang pengusahan memiliki resiko budidaya yang tinggi terhadap hama penyakit, kebakaran menyebabkan peluang hutan rakyat untuk memperoleh pendanaan dari bank konvensional masih belum bisa diharapkan. Selain itu bank masih belum tertarik untuk memfasilitasi kredit perusahaan hutan rakyat. Namun saat ini hutan rakyat memiliki peluang untuk memperoleh pendanaan dalam bentuk insentif dalam bentuk kredit dari pemerintah melalui program BLU. Saat ini program BLU Pusat P2H telah memperluas layanan pembiayaan bagi usaha hutan rakyat (PDB-HR). Dengan

adanya BLU ini diharapkan kegiatan investasi pada hutan rakyat dapat meningkat. Sejalan dengan itu menurut Nugroho (2010) ketika swasta dan bank sudah dapat dibangkitkan minatnya dan telah berperan aktif maka peran BLU Pusat P2H dapat ditingkatkan sebagai lembaga penjaminan kredit usaha hutan rakyat.

Menurut peraturan kepala pusat pembiayaan Pembangunan Hutan No. SK/P2H-1/2012 standar biaya per pohon untuk pembiayaan dan pinjaman pembuatan atau pengayaan hutan rakyat sebesar Rp 20.000 yang dirinci dari tahap awal tahun pertama dan kedua dari pengadaan bibit, penanaman, penyulaman dan pemeliharaan. Dari skema perusahaan hutan rakyat ini apabila dilakukan skema pinjaman dengan BLU sesuai menurut peraturan Kepala Pusat pembiayaan Pembangunan Hutan No. P.01/P2H-2/2012 dengan batas maksimal jumlah pohon yang dapat difasilitasi setara dengan 1000 pohon/ha akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 20.000.000.

Tingkat suku bunga kredit dalam BLU cukup rendah hanya sebesar BI rate sehingga pengembang tidak merasa terbebani dengan bunga kredit. Bunga kredit yang tinggi cenderung membuat masyarakat lebih berpikir lagi untuk memutuskan melakukan kredit karena kekhawatiran tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaan hutan rakyat karena mengembalikan kredit dan bunganya. Menurut Permenkeu No.138 tahun 2012 tingkat suku bunga/imbalance hasil dari BLU atas tarif jasa pembangunan hutan rakyat paling tinggi sebesar BI rate pada saat akad kredit pertahun. Menurut peraturan kepala pusat pembiayaan Pembangunan Hutan No. P.011/P2H-2/2012 jangka waktu pinjaman paling lama 8 tahun. Skema perusahaan hutan rakyat ini pinjaman beserta bunga yang harus dikembalikan sebesar BI rate 7.5% adalah sebesar Rp 33,180.982, sementara untuk biaya perawatan tahun ketiga hingga selanjutnya diasumsikan dengan suku bunga 13% sehingga nilai kelayakan usahanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Analisis finansial pembangunan hutan rakyat dengan skema pinjaman BLU dan Bank

Kriteria kelayakan	Hasil Analisis Finansial
--------------------	--------------------------

NPV	Rp 73.969.579
BCR	1.72
IRR	49%

Beberapakendaladalaman investasi tanaman kayu rakyatadalahmodal, ketersediaan lahan, tatakeloladanstrukturpasar. Modal dalam hal ini adalah biaya pembangunan hutan rakyat, walaupun saat ini telah ada skema pembiayaan dalam bentuk pinjaman dari pemerintah melalui program BLU namun dari hasil perhitungan analisis biaya terlihat bahwa nilai pinjaman hanya mampu mengakomodir biaya pembangunan pada tahun awal saja. Pengembang hutan rakyat masih mengeluarkan uang tambahan untuk biaya pada tahun selanjutnya. Lahan yang tersedia dari perusahaan hutan rakyat yang masih terbatas dan harga sewa yang tinggi. Umumnya lokasi di pulau jawa sudah jarang ditemukan lahan dengan luasan lebih dari 1 ha.Tata kelola pengelolaan hutan rakyat masih kurang hal ini karena kurangnya manajemen dalam pengelolaan. Umumnya pengelolaan hutan rakyat saat ini hanya penanaman dan pemanenan saja tanpa adanya kegiatan pemeliharaan. Strukturpasarkayubulat di PulauJawasangatkompetitif,dimanamasing-masingpenghasilkayudanpembelinyaberjumlahsangatbanyak. Industripengolahkayu di luarJawaumumnyaberskalabesardanmemiliki areal sendiri, sehinggakayudariprodusenkecil yang tidakmemilikiindustriendirikesulitanmemasark ankayubulat yang diproduksinya.Selain itu harga pasar dari kayu rakyat di pulau jawa masih dihargai lebih rendah daripada kayu dari Perhutani.

KESIMPULAN

Kelayakan rencana perusahaan hutan rakyat dengan jenis jabon pola monokultur skema pinjaman bank dengan tiga parameter kelayakan usaha yaitu diperoleh nilai NPV sebesar Rp 74.619.123, BCR sebesar 1.74 dan nilai IRR sebesar 49% dimana lebih besar dari suku bunga yang digunakan yaitu 13%. Kelayakan rencana perusahaan hutan rakyat dengan jenis jabon pola monokultur skema pinjaman BLU dan bank dengan tiga parameter

kelayakan usaha yaitu diperoleh nilai NPV sebesar Rp 73.969.579, BCR sebesar 1.73 dan nilai IRR sebesar 49% dimana lebih besar dari suku bunga yang digunakan yaitu 13%. Sehingga dapat dikatakan perusahaan hutan rakyat ini menguntungkan secara finansial. Keuntungan dari perusahaan hutan rakyat dengan mekanisme pinjaman BLU adalah suku bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga BI rate, pengembalian pinjaman pada akhir daur pemanenan. Sedangkan kelemahannya pengembang hutan rakyat masih mengeluarkan biaya pemeliharaan setelah tahun ketiga karena pinjaman BLU hanya mengakomodir pinjaman usaha hutan rakyat pada tahun pertama dan kedua saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan RI. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan. Departemen Keuangan RI. Jakarta
- Departemen Kehutanan RI. 2012. Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor P.01/P2H-2/2012 tentang Pedoman Permohonan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa Lembaga Perantara. Departemen Kehutanan RI. Jakarta
- Departemen Kehutanan RI. 2012. Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor Sk.16/P2H-1/2012 tentang Biaya per pohon Untuk Pembiayaan dan Peminjaman Pembuatan/Pengayakan dan Pemeliharaan Hutan rakyat. Departemen Kehutanan RI. Jakarta
- Halawane et al. 2011. Prospek Pengembangan Jabon Merah (*Anthocephalus macrophyllus* Roxb.Havil) Solusi Kebutuhan Kayu Masa Depan. Balai Penelitian Kehutanan Manado. Manado.
- Gittinger, J.P. 1986. Analisa Ekonomi Proyek Poyek Pertanian. Edisi Kedua. Universitas Indonesia. Jakarta
- Klemperer, D. 1996. Forest Resources Economics and Finance. Mc Graw Hill Book Company. New York
- Krisnawati, H., Kallio, M. dan Kanninen, M. 2011.*Anthocephalus cadamba* Miq.: Ekologi, Silvikultur dan Produktivitas.CIFOR. Bogor.
- Mansur, I. 2012. Prospek Pengembangan Jabon untuk Mendukung Pengembangan Hutan Tanaman. Seminar dan Pameran Hasil Penelitian dengan Tema Prospek Pengembangan Hutan Tanaman (Rakyat). Konservasi dan Rehabilitasi Hutan. Manado
- Nair, K.S.S dan Sumardi 2000 Insect pests and diseases of major plantation species. *Dalam: Nair, K.S.S. (ed.) Insect pests and diseases in Indonesian forests: an assessment of the major treats, research efforts and literature.* CIFOR. Bogor
- Nugroho, B. 2004. Ekonomi Keteknikan Analisis Finansial Investasi Kehutanan dan Pertanian. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Nugroho, B. 2010. Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat. Jurnal Manajemen Hutan Tropis, Vol. XVI, (3): 118-125.
- Nugroho, B. 2011. Analisis Perbandingan Beberapa Skema Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Berbasis Masyarakat di Indonesia. Jurnal Manajemen Hutan Tropis, Vol. XVII, (2): 79-88
- Wijayanto. 2007.Insentif Perusahaan Hutan Rakyat. Prosiding Pengembangan Hutan Rakyat Mendukung Kelestarian Produksi Kayu Rakyat. P2SEKK. Bogor